

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP
PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

**Penyelesaian Penyidikan Terhadap Pelaku Yang Mengancam
Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Surabaya Selatan**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

Fajar Amin
NPM. 0671010076

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengambil judul **“Perlindungan Hukum oleh penyidik Terhadap Korban Perkosaan Penyelesaian Penyidikan Terhadap Pelaku Yang Mengancam Korban Perkosaan di Kepolisian Resort Surabaya Selatan”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan untuk menambah wawasan, serta menerapkan dan membandingkan teori hukum yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di masyarakat.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Soetrisno, S.H., M.Hum selaku WADEK II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang ramah dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa ataupun memberikan saran kepada mahasiswa.
4. Bapak Subani S.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Prof. Dr. Wahyono, S.H., M.S., selaku Pembimbing Utama yang selalu memberi kemudahan dan solusi kepada penulis.
6. Ibu Mas Anienda tien F, S.H, MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan dukungan, masukan, dan kesabaran dalam memberikan pengarahan terhadap penulis.
7. Kedua Orang tuaku, yakni Drs. Zaenal Fatah selaku Ayah dan Sri Yuliani Purwaningsih selaku Ibu, yang selalu memberikan bantuan, doa, saran dan kritik, serta dukungan di setiap langkah yang penulis kerjakan.
8. Kakek Soebari dan nenek Surati yang selalu memberikan motivasi dan doa.
9. Kedua kakak penulis, Panjí Tamrin Amin dan Panjí Cakra Wira Atmaja yang selalu membuat penulis lebih berfikir dewasa dalam menilai dan melakukan segala hal.
10. Bapak Eko Wahyudi, S.H., Fauzul S.H.I., M.Hum, serta Ibu Yana Indawati, S.H, M.Kn dan Wiwin Yulianingsih, SH., M.Kn., yang selalu bersikap fleksibel dan tidak terkesan formil kepada mahasiswa-mahasiswanya sehingga menjadikan peneliti lebih terbuka dalam berkomunikasi.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen program studi Ilmu Hukum yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.
12. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur yang sabar dan ramah dalam melayani mahasiswa.
13. Teman-teman mahasiswa yang selalu ada di hati khususnya kepada Dony, Wahib, Putu, Rudy, Sigit, Reni, Lucia, Ruben, Maya, Leny, Kiki, Manda,

kalian penyemangat dan pepeneliti dalam menyelesaikan pembuatan proposal ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, maka penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi momentum awal yang berharga dan bermanfaat bagi perkembangan disiplin ilmu terutama dalam bidang ilmu hukum serta tegaknya hukum di Indonesia.

Surabaya, 10 Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Kajian Pustaka.....	5
6. Metodologi Penelitian	11
BAB II UPAYA POLISI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DARI ANCAMAN PELAKU	
1. . Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Ditangani Oleh Pihak Kepolisian Resor Surabaya Selatan.....	16
2. Proses Penanganan Polisi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan.....	18

2.1. Proses Penangkapan dan Penahanan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	
Menurut KUHP	25
2.2. Proses Penggeledahan dan Penyitaan Pelaku Tindak Pidana Perkosaan	
Menurut KUHP	31
3. Bentuk Upaya Polisi Dalam Melindungi Korban Dari Ancaman Pelaku	35
BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN	
HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAN DARI ANCAMAN	
PELAKU DI KEPOLISIAN RESOR SURABAYA SELATAN	
1. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Yang Di Hadapi Polisi	41
2. Solusi Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Pihak Kepolisian Resor	
Surabaya Selatan.....	45
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	47
2. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mempunyai sifat melanggar hukum, sifat melanggar hukum merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana tertentu yang ada di dalam KUHP. “Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.¹

Tanggapan masyarakat terhadap kriminalisasi perbuatan kesusilaan adalah sebagian besar masyarakat menyetujui bahwa perbuatan pelanggaran kesusilaan adalah perbuatan kriminal. Sebagian perbuatan asusila itu dipandang meresahkan masyarakat dan menjaga keharmonisan hubungan diantara norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Ada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia guna melindungi kaum perempuan tindak pidana perkosaan, maksud dan tujuan untuk menciptakan rasa aman dikalangan masyarakat. Sudah banyak upaya yang dilakukan oleh Negara demi memberikan rasa aman terhadap warganya, tetapi kejahatan itu selalu terjadi. Hal ini karena terbatasnya aparat kepolisian akan menjaga keamanan dalam masyarakat dan kesadaran masyarakat.

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak, hampir setiap hari dapat kita baca berita di koran-koran maupun melalui media televisi, setiap hari hampir

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, h 1

selalu ada perempuan yang menjadi korban kekerasan, membahas kedudukan korban kejahatan perlu dikemukakan pengertian tentang korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, berbicara masalah korban sebenarnya bukan hal baru, dikaitkan dalam suatu kejahatan maka korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya kejahatan².

Ditinjau dari sisi hukumnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan masih sangat kurang, untuk itu perlu kita ketahui bahwa berbicara mengenai hukum akan terkait dengan sistem hukum mencakup tiga hal, yaitu substansi atau perumusan pasalnya, strukturnya atau aparat penegak hukumnya serta kultur atau budaya hukum, ketiganya sangat erat kaitannya satu sama lain, sehingga kalau kita ingin mengubahnya maka kita harus memperhatikan ketiga hal tersebut.

Tindak pidana yang terjadi selalu mengalami kenaikan bisa kita lihat perilaku kehidupan masyarakat telah terjadi pergeseran nilai-nilai moral yang antara lain sering kita dengar banyak terjadi perkosaan baik atau tindakan asusila lainnya di kota besar maupun di kota-kota kecil.

Di Surabaya khususnya di wilayah Polres Surabaya Selatan hal ini menunjukkan bahwa kejahatan asusila yang berupa perkosaan sering terjadi di Wilayah Hukum Polres Surabaya Selatan. Memperhatikan ancaman pidana terhadap jenis kejahatan perkosaan cukup berat, namun ternyata tidak menurunkan niat pelakunya. Dari hasil penelitian yang pernah saya dapatkan di kepolisian resor Surabaya Selatan. Bahwa motivasi pelaku perkosaan lebih banyak didorong oleh keinginan untuk melampiaskan nafsu seks (80%) dengan modus usaha untuk mengajak korban ke tempat yang lebih aman (85%) mengenai tingkat kedekatan antara korban dan pelaku

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004, h. 41

dalam terjadinya kejahatan perkosaan mereka sudah saling mengenal sebelum terjadinya peristiwa tersebut (70%).³ Di zaman modern seperti yang sekarang ini semakin hari semakin meningkat sehingga masyarakat banyak yang resah terutama bagi perempuan.

Salah satu fakta di lapangan yang peneliti peroleh dari data kasus perkosaan di Kepolisian Resor Surabaya selatan adalah kasus tindak pidana perkosaan yang menimpa perempuan sebut saja namanya Putri (nama samaran) pada hari rabu tanggal 4 november tahun 2009 sekitar pukul 21.30 wib. Kejadian itu terjadi dirumah pelaku (pemilik kost) yang juga adalah tempat kost korban, rumah dengan keadaan hanya ada korban (*penghuni kost*) dan pelaku (*pemilik kost*). Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan pelaku. Setelah kejadian itu korban langsung melaporkan tindakan pelaku tanpa memikirkan ancaman pelaku tersebut.

Prosedur pelaporan korban perkosaan ke Kepolisian Resor Surabaya Selatan, yaitu :

1. Adanya pelaporan dari korban.
2. Pihak kepolisian melakukan visum terhadap korban.
3. Dilakukan pemeriksaan saksi-saksi.
4. Pihak kepolisian melakukan olah TKP
5. Setelah adanya bukti yang cukup dilakukan penangkapan terhadap tersangka.
6. Mengumpulkan bukti-bukti.
7. Setelah BAP dinyatakan P.21 maka tersangka, BB, BAP, dikirim ke kejaksaan

³ Sumber : Satuan Reskrim Polres Surabaya Selatan Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang sebagai berikut :

- a. Apa bentuk upaya polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan dari ancaman pelaku ?
- b. Apa hambatan dan solusi dari polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dari ancaman pelaku?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya polisi dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan dari ancaman pelaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan solusi dari polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan karena ancaman dari pelaku.

4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dicapai penelitian ini adalah :

A. Manfaat Teoritis ilmu hukum :

1. Dapat mengetahui apa saja upaya polisi dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dari ancaman pelaku.
2. Dapat mengetahui bagaimana hambatan dan solusi polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan karena ancaman dari pelaku.

B. Manfaat Praktis :

1. Bagi korban agar Memberikan pemahaman kepada tentang bentuk perkosaan yang semakin meningkat saat ini. Dan selalu berhati-hati dalam pergaulan di jaman modern saat ini.
2. Bagi pelaku agar pelaku jera dan tidak mengulangi tindak kejahatan itu.
3. Bagi polisi adalah diharapkan selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya para perempuan agar kasus tindak pidana perkosaan yang sering terjadi, dapat ditangani oleh kepolisian khususnya pihak reserse kriminal dan ditangkap pelakunya agar kasus seperti ini tidak merajalela di masyarakat.

5. Kajian Pustaka

5.1. Tugas Dan Fungsi Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dimana peraturan pelaksanaannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan standart oprasional Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam penegakan hukum kepada masyarakat tetap berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 13, merumuskan sebagai berikut :

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, merumuskan sebagai berikut :

1. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Menegakkan dan menjunjung tinggi hukum adalah merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menangani segala jenis tindak pidana, yaitu : melalui proses penyelidikan dan proses penyidikan.

Proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dilaksanakan setelah adanya pelaporan dari korban, prosedur pelaporan korban di Kepolisian Resort Surabaya Selatan, adalah :

1. Korban harus melapor pada bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), dengan membawa identitas diri.
2. Korban juga harus membawa berkas-berkas atau kelengkapan lain, yang nantinya akan digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.⁴

Standart operasional prosedur Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- 4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6) mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- 7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- 8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 9) mengadakan penghentian penyidikan.
- 10) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

⁴ Sumber : Satuan Reskrim Polres Surabaya Selatan Kemitraan V Perlindungan Perempuan dan Anak

Visi kepolisian resor Surabaya selatan adalah terwujudnya postur polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam melindungi masyarakat dan menegakan hukum, sedangkan misi kepolisian resor Surabaya selatan :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, tanggap atau progresif dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sepanjang waktu di seluruh wilayah serta memfasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam memelihara kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Nasional) di lingkungan masing-masing.
- c. Memelihara kamtibmas (Keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas) untuk menjamin keselamatan dan kelancaran orang dan barang.
- d. Mengembangkan perpolisian masyarakat (*Community Policing*) berbasis pada masyarakat patuh hukum (*Law Abiding Citizen*).
- e. Menegakan hukum secara profesional dan obyektif, proposional, transparan, akuntabel dalam menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- f. Mengelola secara profesional, transparan dan akuntabel seluruh sumber daya POLRI.

Data-data mengenai tindak pidana perkosaan mulai dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 di Kepolisian Resor Surabaya Selatan, yaitu :

Tabel 1

Jenis Kejahatan	Jumlah kasus (perkosaan)	Telah terungkap	Belum terungkap
perkosaan	8 Kasus	5 Kasus	3 Kasus

Sumber : Kantor Satuan Reskrim Polres Surabaya Selatan Unit I Pidum.

Data-data angka perkosaan yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Surabaya Selatan, yaitu : jumlah kasus perosaan, yaitu : 8 kasus, yang telah terungkap sebanyak 5 kasus, dan yang belum terungkap sebanyak 3 kasus. Data yang belum terungkap dikarenakan bukti-bukti yang di peroleh dari korban tidak cukup.

5.2. Pengertian Perkosaan

Pengertian perkosaan dengan kekerasan dan ancaman yang dimaksud di dalam pasal KUHP, yaitu :

Pasal 285 :“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan unsur-unsur pasal tersebut :

- Barangsiapa, dalam hal ini pasti laki-laki atau perempuan.
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, berarti setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga fisik yang tidak ringan, atau menimbulkan ketakutan atau kecemasan karena ancaman.
- Memaksa untuk bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.
- Diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.⁵

Salah satu jenis tindak pidana perkosaan yang paling sering terjadi di

⁵ *Sumber : Satuan Reskrim Polres Surabaya Selatan Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak*

dalam lingkungan warga masyarakat, dikarenakan maraknya pergaulan bebas. Serta tindak pidana pelecehan seksual yang berakibatkan perkosaan bisa dikategorikan kedalam beberapa bentuk, yakni : menyampaikan lelucon jorok dan vulgar, menyakiti dan membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menginterogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya meminta imbalan seksualnya dengan janji untuk mendapatkan kerja atau promosi lainnya. serta maraknya video porno dan kurangnya perhatian dari keluarga.

Perkosaan (*rape*) berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁶ Pengertian perkosaan menurut Suryono Ekotama adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.⁷ pada jaman dahulu perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Perkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan.

Dampak Pamerkosaan tidak hanya menghilangkan keperawanan seorang perempuan atau si korban, namun memberi dampak besar dari segi fisik maupun kejiwaannya lainnya yaitu :

- a. Kehamilan yang tidak dikehendaki.
- b. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular.
- c. Dapat pengucilan dalam lingkungan keluarga.
- d. Dapat pengucilan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya.

⁶ Haryanto. 1997. *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Perkosaan Terhadap Wanita*.

⁷ Suryono Ekotama, 2000. *Abortus Provokatus bagi korban perkosaan hal 99*

- e. Hilangnya rasa percaya diri korban dikarenakan kesucian sebagai salah satu identitas diri perempuan telah hilang.
- f. Hilangnya hak dalam mngeyam pendidikan.
- g. Dampak phisklogis bagi korban sangat besar, korban depresi dan juga bisa berakhir bunuh diri akibat beban mental yang dialami.⁸

Tindak pidana perkosaan yang bisa sampai mengakibatkan kematian diatur dalam pasal di KUHP :

Pasal 291 ayat 2 :

”jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

5.3. Pengertian Perlindungan

Perlindungan menurut undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal satu ayat empat adalah segala upaya yang di tujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.⁹

Pasal 1 ayat Lima tentang Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.¹⁰

5.4. Pengertian Korban

⁸ Sumber : Satuan Reskrim Polres Surabaya Selatan Kanit V Perlindungan Perempuan dan Anak

⁹ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Saksi Dan Korban*, penerbit Asa Mandiri Jakarta, 2009, h. 2

¹⁰ Ibid

Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.¹¹

Pengertian korban menurut Undang-Undang Replubik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 1 ayat 3, adalah seseorang menderita fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.¹²

6. METODOLOGI PENELITIAN

6.1. Jenis Dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum Normatif, yaitu : mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹³

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum diskriptif.

¹¹ Arif gosita, *masalah korban kejahatan*, PT bhuana ilmu populer kelompok gramedia 2004, hal 64

¹² *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Saksi Dan Korban*, penerbit asa mandiri jakarta, 2009, hal 2

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

¹⁴ Ibid, h. 50.

6.2. Sumber Data

Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier .

a. Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dan terdiri dari :

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu : Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
 - Undang-undang.
 - Peraturan pemerintah.

Berdasarkan teori diatas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
 3. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Undang-undang penghapusan kekerasan rumah tangga dan perlindungan saksi dan korban.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁵

6.3. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan untuk menganalisis skripsi ini, adalah : Data Sekunder, yaitu : data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan bahan hukum dan data, adalah : studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, Peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tindak pidana perkosaan.¹⁶

6.4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.¹⁷

6. 5. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid*, h. 82.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, h. 127

BAB I : merupakan pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, latar belakang ini adalah dasar dari pemilihan judul skripsi, setelah di dapatkan permasalahan maka dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan. Di dalam bab I ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, dan metode penelitian. Agar keempat bagian tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini. Dengan maksud apa yang dikonsepkan dapat terarah dengan jelas. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berguna untuk meringkas poin yang ada di dalam skripsi.

BAB II : pada bab II merupakan bab pembahasan, dalam bab II ini akan membahas tentang rumusan masalah pada bab I, yaitu : Bentuk upaya polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan dari ancaman pelaku, yang meliputi : Kasus tindak pidana perkosaan yang di tangani oleh pihak Kepolisian Resor Surabaya Selatan, Proses penanganan polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, terdiri atas : Proses penangkapan dan penahanan pelaku tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan Proses penggeledahan dan penyitaan pelaku tindak pidana pemerkosaan menurut KUHP, Bentuk-bentuk upaya polisi dalam melindungi korban dari ancaman pelaku.

BAB III : pada bab III merupakan bab pembahasan, dalam bab III ini akan membahas tentang rumusan masalah yang ke dua pada bab I, yaitu : hambatan dan solusi dari polisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban perkosaan dari ancaman pelaku : Hambatan dan dalam proses penyidikan yang di hadapi polisi, Solusi penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh pihak Kepolisian Resor Surabaya Selatan

BAB IV : pada bab IV adalah bab penutup atau akhir, dimana pada bab ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : kesimpulan dari semua pokok bahasan (dari bab I, bab II, bab III) dan saran yang dapat diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.